



Optimalisasi Peran Pengawas Bina Terhadap Hambatan Pengimplementasian Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Binaan

Optimizing the Role of Development Supervisors on Obstacles to Implementing the Merdeka Curriculum in Assisted Madrasahs

Lisnawaty Dukalang

Kementerian Agama Kota Gorontalo
Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
lisnawatydukalang718@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 22 Agustus 2023
Revised: 7 September 2023
Accepted: 20 September 2023

Keywords:

Optimalisasi
Pengawas Sekolah
Guru
Kurikulum Merdeka

Abstract

The development of education in Indonesia in the 21st century has undergone significant transformation. The change from the KTSP curriculum to K13, and then to the Merdeka Curriculum, has faced various challenges, including the impact of the Covid-19 pandemic. The Merdeka Curriculum was designed to be flexible, providing freedom for learners, educators, and schools to tailor learning according to individual interests, talents, and development. However, the implementation of this curriculum has encountered several obstacles, including educator readiness, limited understanding, and resource constraints. This research employs a qualitative method, with primary participants acting as school supervisors and support participants consisting of teachers and school principals. The research results indicate that the obstacles in the implementation of the Merdeka Curriculum include a lack of knowledge and experience among teachers, facility limitations, and insufficient understanding of the Merdeka Curriculum concept. The role of school supervisors in addressing these obstacles is crucial. Supervisors serve as facilitators, trainers, and mentors for teachers. They also need to assist schools in overcoming infrastructure limitations. Optimizing the role of supervisors in supported schools is key to addressing obstacles in the implementation of the Merdeka Curriculum. With an optimal role, supervisors can help schools address teacher knowledge limitations, provide constructive feedback, and ensure that schools follow improvement guidelines. Through collaboration between supervisors and schools, it is hoped that the implementation of the Merdeka Curriculum can become more effective and of higher quality, thereby enhancing the quality of education in Indonesia.

Abstrak

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan kurikulum dari KTSP ke K13, lalu ke Kurikulum Merdeka, menghadapi berbagai tantangan termasuk dampak pandemi Covid-19. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai kurikulum yang fleksibel, memberikan kebebasan pada peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan individu. Namun, implementasi kurikulum ini telah dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk kesiapan pendidik, pemahaman yang kurang, dan keterbatasan sarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan partisipan utama berperan sebagai pengawas sekolah dan

partisipasi pendukung dari guru dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka meliputi kurangnya pengetahuan dan pengalaman guru, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pemahaman tentang konsep kurikulum Merdeka. Peran pengawas sekolah dalam membantu mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting. Pengawas berperan sebagai fasilitator, pelatih, dan pembimbing guru. Mereka juga harus membantu sekolah dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana. Optimalisasi peran pengawas di sekolah binaan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan peran yang optimal, pengawas dapat membantu sekolah dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan guru, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memastikan bahwa sekolah mengikuti arahan perbaikan. Melalui kolaborasi antara pengawas dan sekolah, diharapkan implementasi kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih efektif dan berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Corresponding Author:

Lisnawaty Dukalang
Kementerian Agama Kota Gorontalo
lisnawatydukalang718@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Pendidikan Indonesia pada abad 21 ini mengalami transformasi yang sangat signifikan. Dimulai dari berubahnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 atau yang disebut K13, dan digantinya K13 dengan Kurikulum Merdeka hingga saat ini. Perubahan-perubahan ini dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan dari berbagai macam keadaan yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada 2 tahun terakhir, di mana pemerintah benar-benar harus melakukan perombakan kurikulum berulang kali demi menjaga tidak turunnya kualitas pendidikan nasional karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Kurikulum merdeka atau yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe merupakan kurikulum yang bersifat fleksibel. Di mana dalam penerapannya, kurikulum merdeka didesain untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang ada pada Lembaga Pendidikan dalam hal ini sekolah. Kurikulum merdeka didesain sefleksibel mungkin sebagaimana yang dijelaskan oleh (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022) dalam tulisannya, "kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik dan sekolah, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan atau memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat dan aspirasinya". Sama halnya dengan peserta didik, pendidik juga dapat mengajarkan sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik, (Kemdikbudristek, 2022). Selain itu, hadirnya kurikulum merdeka juga memberikan kemudahan bagi sekolah untuk dapat mengembangkan serta mengelola kurikulum dan pembelajaran berdasarkan keadaan peserta didik dan juga keadaan satuan pendidikan di setiap daerah (Kemdikbudristek, 2022).

Dalam pelaksanaannya, penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh pihak sekolah baik guru, kepala sekolah dan bahkan peserta didik menemukan berbagai hambatan sehingga hal ini mempengaruhi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan dari kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan bahagia. Arifa menjelaskan salah satu hal yang menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu pendidik yang belum memiliki kesiapan serta kemampuan untuk membuat perencanaan pembelajaran yang efektif (Arifa, 2022). Masih ada guru yang tidak menerapkan cara belajar sebagaimana yang ada dalam kurikulum merdeka sehingga tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap keberhasilan Pendidikan. Hambatan lainnya juga datang dari para guru, siswa, maupun orang tua, mayoritas dari mereka yang masih kurang memahami tentang ide Merdeka Belajar yang ada di kurikulum merdeka, bahkan ada yang sama sekali belum familiar dengan istilah tersebut (Lestiyani, 2020). Oleh karena itu perhatian dari pihak-pihak yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah dibutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang utuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan berperan sebagai mitra dan pembimbing, pengawas sekolah dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru, serta memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan

dengan efektif dan berkualitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmah (2018), Pengawas sekolah merupakan individu yang memiliki pemahaman yang mendalam, memahami seluruh aspek dari permasalahan yang dihadapi oleh para guru. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Izzudin dan Susilowardani menjelaskan bahwa peran pengawas sekolah yang optimal melalui peningkatan kinerja dalam proses belajar-mengajar dapat membantu guru meningkatkan kompetensi pribadi mereka, baik dalam aspek pedagogis, profesional, maupun sosial serta memberikan dorongan untuk meraih perkembangan dalam karier mereka sebagai pendidik. Selain itu, para guru memiliki peluang untuk terlibat dalam diskusi, di mana mereka dapat bersama-sama menggali dan mengatasi permasalahan dengan bertukar pikiran serta berbagi informasi. Langkah-langkah ini mewakili upaya nyata dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pendidik (Izzudin & Susilowardani, 2012)

Sehingganya, sangat perlu bagi peneliti untuk menginvestigasi bagaimana peran pengawas sekolah terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hambatan-hambatan yang dialami sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan sudah sejauh apa optimalisasi peran pengawas dalam memberikan pembinaan, pelatihan, pengarahan serta tindakan pengawasan lainnya yang berdasarkan peran pengawas terhadap masalah yang dihadapi sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki bagaimana optimalisasi peran pengawas terhadap hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, metode kualitatif adalah metode yang paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2008), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menggunakan lingkungan alam sebagai sumber datanya, ini adalah karakteristik dari metode penelitian kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif meyakini kebenaran itu bersifat dinamis dan hanya dapat diketahui melalui penyelidikan terhadap interaksi situasi sosial masyarakat (Mulyana, 2009). Demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan melihat hambatan yang dialami sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan bagaimana tindakan pengawas dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengawas bina di sekolah binaannya.

Penelitian ini menggunakan 2 partisipan sebagai sumber datanya, yaitu partisipan utama dan partisipan pendukung, dimana pengawas yang akan menjadi partisipan utama sedangkan pihak sekolah akan menjadi partisipan pendukung, dalam kasus ini yaitu guru dan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan dilakukan di satuan pendidikan yang menjadi sekolah binaan dari pengawas yaitu MTs Alkhairat Kota Gorontalo dan MTs Nurul Yaqin. Adapun tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengembangkan (*develop*) pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang relevan yang berkaitan dengan peran pengawas sekolah dan mendesain strategi (*strategy design*) pengumpulan data demi menjaga kualitas dari data yang dikumpulkan. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan prosedur teknik analisis yaitu berupa reduksi data, display, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018, P.19).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui google form. pertanyaan yang diberikan kepada pihak sekolah dan pengawas berbeda dan didesain sebagai open-ended question atau bentuk pertanyaan yang dikembangkan demi mendapatkan jawaban yang lebih luas. Sehingga, data yang dikumpulkan dari partisipan tidak hanya mengacu pada satu titik masalah tetapi juga dapat berkembang berdasarkan aspek-aspek masalah yang ditemukan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hambatan Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peran Pengawas Bina

Rahmah menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang diberi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian terhadap individu atau lembaga yang sedang dibinanya (Rahmah, 2018). Aktivitas ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki peran sebagai supervisor. Di konteks pendidikan, peran ini dikenal dengan sebutan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Prinsip utamanya adalah menjalankan pengawasan dengan cara yang baik dan tepat, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Dengan melakukan pengawasan yang efektif, diharapkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat terus meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari tugas fungsionalnya, pengawas sekolah adalah seorang pegawai negeri sipil yang diberikan tanggung jawab, tugas, dan wewenang sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang. Peran utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pendidikan di lingkungan sekolah dengan fokus pada aspek penilaian dan pembinaan dalam bidang teknis pendidikan dan administrasi. Lingkup tugas ini mencakup satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah. Selain itu pengawas sekolah memiliki peran ganda sebagai mitra bagi guru dan kepala sekolah. Mereka berperan sebagai inovator, konselor, motivator,

kolaborator, asesor, evaluator, dan konsultan. Dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah, pengawas sekolah dapat melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya adalah pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Kedua kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah (PP No. 21 Tahun 2010).

Berdasarkan data dari kuesioner yang diisi oleh pihak sekolah, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi pihak sekolah pada saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adapun hambatan-hambatan tersebut tidak jauh dari temuan penelitian sebelumnya yang berada dirana yang sama. Beberapa hambatan tersebut yaitu; 1) kurangnya bekal guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran seperti TP dan modul ajar, 2) masih belum menguasai konsep dari merdeka belajar, 3) kurangnya pengalaman akan merdeka belajar, 4) kurangnya fasilitas untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, 5) terbatasnya waktu untuk mempelajari kurikulum merdeka, 6) kurangnya penguasaan terhadap format penilaian, 7) minimnya motivasi guru dalam mempraktekkan kurikulum merdeka 8) guru kurang memahami bagaimana konsep pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka dan, 9) masih kurangnya referensi guru akan kurikulum merdeka.

Dengan kasus tersebut, tentunya ini menjadi penting bagi pengawas di sekolah binaan untuk dapat mengoptimalkan peran mereka demi tercapainya tujuan dari kurikulum merdeka. Peran pengawas sangatlah dibutuhkan untuk membantu sekolah dalam mengatasi hambatan yang dialami selama pengimplementasian kurikulum Merdeka. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Guru kelas 4 yang berada di sekolah MTs Nurul Yakin yang mengalami hambatan dalam membuat administrasi pembelajaran, menjelaskan bahwa *“hal yang menjadi hambatan saya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yaitu pada saat membuat, menyusun tujuan pembelajaran dan modul ajar dikarenakan kurikulum merdeka adalah hal baru bagi saya”*. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan pengetahuan guru dalam membuat administrasi pembelajaran menjadi salah satu hambatan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah. Hal ini dikarenakan kurikulum merdeka yang hadir dengan konsep baru, adanya diferensiasi pembelajaran dan juga Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Arifa dalam artikelnya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar guru belum mampu menciptakan rencana pembelajaran yang efektif sehingga tujuan dari kurikulum merdeka dalam pendidikan belum sepenuhnya tercapai (Arifa, 2022).

Adapun langkah yang diambil guru dalam menghadapi hambatan ini yaitu tidak lain adalah melibatkan pengawas bina yang bertugas di satuan pendidikan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kelas dari MTs Nurul Yakin ini *“tentu saja saya melibatkan pengawas dalam mengatasi hambatan ini, dimana saya terus mengikuti diklat, pelatihan terkait kurikulum merdeka bersama pengawas. Selain itu saya juga memperbanyak diskusi dengan pengawas bina terkait kurikulum merdeka. pengawas juga sangat sering memberikan coaching kepada pihak sekolah sehingga ini sangat membantu saya dalam memahami lebih jauh tentang kurikulum merdeka”*.

Disisi lain, ada beberapa guru yang menyatakan bahwa pengalaman akan kurikulum merdeka menjadi hal penting untuk dapat memudahkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebagaimana pernyataan dari Guru kelas 5 di MTs Nurul Yakin, *“bagi saya pengalaman dalam implementasi kurikulum merdeka adalah hal penting untuk dimiliki. Karena jujur saja dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini tidak mudah bagi kami terutama bagi saya sendiri sebagai guru kelas di sekolah ini sebab kurangnya pengalaman saya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagaimana guru di sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu menggunakan kurikulum merdeka. Selain minimnya pengalaman dalam IKM, guru yang bersangkutan juga menambahkan bahwa hambatan yang dialaminya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yaitu kurangnya akses yang digunakan untuk mempelajari kurikulum merdeka, yaitu akses berupa media atau sarana pendukung yang dapat meningkatkan pengetahuan guru akan kurikulum merdeka.*

Terkait dengan peran pengawas bina di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah binaan, Guru kelas 5 MTs Nurul Yakin menjelaskan bahwa peran pengawas bina yang ada di sekolahnya cukup membantu untuk mengatasi hambatan yang dia alami. Guru ini menjelaskan *“ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan yang saya alami selama mengimplementasikan kurikulum merdeka, mulai dari mengikuti forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPM) dan yang paling sering yaitu menjaga komunikasi dengan pengawas sekolah karena ini yang paling penting. Saya banyak mendapatkan solusi dari hambatan atau juga masalah yang alami selama mengimplementasikan kurikulum merdeka”*.

Dari apa yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan bisa menjelaskan bahwa keoptimalan peran pengawas bina di sekolah ini sudah sangat baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingkat kepuasan pihak sekolah terutama guru terhadap pelayanan dan juga pendampingan yang diberikan oleh pengawas kepada sekolah dalam pada saat menghadapi hambatan-hambatan yang mereka alami selama mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Guru kelas 5 tersebut pada kuesioner yang dibagikan *“jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pengawas bina, menurut saya peran pengawas bina yang ada disini*

sudah optimal dalam membantu sekolah untuk menghadapi hambatan pengimplementasian kurikulum merdeka. pengawas sangat intens dan peduli terhadap sekolah, karena pengawas sering mendatangi dan juga menghubungi kami ketika kami mendapati hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Tidak hanya itu, pengawas juga sering terlibat langsung dalam memberikan materi di forum MGMP”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan pihak sekolah baik kepala sekolah dan guru tentang kurikulum merdeka adalah cikal bakal dari munculnya hambatan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebagaimana pernyataan dari 2 orang guru yang mengalami hambatan dalam IKM dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mereka dalam implementasi kurikulum merdeka menjadi bukti kuat dari munculnya hambatan tersebut. Hal ini bisa jadi dikarenakan kurangnya minat dari pendidik yang ada disatuan pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi digital. Sebab jika dikaji kembali, pada abad 21 ini seharusnya seluruh informasi sudah sangat mudah untuk didapatkan seiring berkembangnya teknologi informasi pada saat ini. Lestiyani (2020), menjelaskan bahwa kemampuan literasi digital dari para pelaku pendidikan masih sangatlah kurang, padahal digitalisasi maupun keterampilan literasi merupakan salah satu bekal untuk menguasai konsep dari kurikulum merdeka. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku Pendidikan harus memiliki keterampilan literasi digital sebagai solusi untuk dapat memudahkan mereka dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Lestiyani dalam mencapai keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, pendidik dan peserta didik harus memiliki beberapa keterampilan yaitu: (1) keterampilan, berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif. (2) Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. (3) Keterampilan mencari informasi, membagi informasi, menggunakan informasi dan teknologi (Lestiyani, 2020). Oleh karena itu perhatian dari pihak-pihak yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah dibutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang utuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pihak-pihak ini tidak lain adalah mereka yang dapat mengontrol langsung atau melakukan pengawasan terhadap kemampuan, kreativitas dan kinerja dari para pendidik yang ada di sekolah, salah satunya adalah pengawas sekolah.

Disisi lain, implementasi kurikulum merdeka tidak hanya menuntut SDM dari para pelaku pendidikan akan tetapi juga memerlukan dukungan berupa sarana prasarana yang memadai dan penganggaran yang tepat agar dalam implementasinya tidak menjadi beban dan malah menimbulkan hambatan bagi sekolah (Arifa, 2022). Pernyataan ini sesuai dengan data penelitian yang ditemukan dari jawaban partisipan pada kuesioner yang telah dibagikan kepada pihak sekolah. Dari pernyataan Guru kelas 3 di MTs Alkhairat menjelaskan *“hambatan yang kami alami adalah kami tidak memiliki buku teks guru maupun siswa seperti di K13, sehingga ini menghambat kami dalam menyusun ATP, modul ajar dan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak efektif”.*

Sebagaimana Kurikulum 2013, kurikulum merdeka tentunya juga membutuhkan media pembelajaran demi menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam kurikulum merdeka buku teks guru dan siswa masih menjadi salah satu media pembelajaran yang penting. Sama halnya dengan kurikulum merdeka, buku teks guru dan siswa yang ada di kurikulum merdeka juga hadir dengan konsep baru untuk pembelajaran. Demi melancarkan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tentunya buku teks kurikulum merdeka sangat penting untuk diadakan sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi sekolah. Dalam mengatasi hambatan ini sekolah dan pengawas bina tentunya benar-benar membutuhkan kerja ekstra karena kedua belah pihak dituntut untuk sekreatif mungkin dapat menghadirkan bahan ajar dan administrasi pembelajaran dengan media yang serba terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kelas 3 MTs Alkhairat *“peran pengawas bina di sekolah kami menurut saya belum cukup optimal karena ada banyak faktor dan hal-hal yang harus dibenahi-satu persatu, contohnya pada saat menyediakan materi pembelajaran kurikulum merdeka kami masih mengalami hambatan karena kurangnya sarana prasarana untuk mendukung IKM. Sehingga menurut saya dengan keterbatasan ini menjadikan peran pengawas bina di sekolah belum cukup optimal.”*

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Guru di MTs Alkhairat menjelaskan adanya perbedaan dari keoptimalan peran guru disekolah binaan. Hal ini dikarenakan oleh kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka yang tidak sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa IKM membutuhkan kesiapan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hambatan. Kesiapan-kesiapan ini berupa kesiapan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas sekolah dan satuan pendidikan itu sendiri dalam menyediakan sarana prasarana pendukung IKM. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kesiapan sekolah juga bisa menjadi hambatan bagi sekolah dan dapat mempengaruhi optimalnya peran pengawas sekolah dalam meminimalisir hambatan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal ini perlu menjadi perhatian dan harus dibicarakan kembali oleh pihak sekolah, pengawas bina dan juga pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan sehingga implementasi kurikulum merdeka lebih dapat dimaksimalkan lagi demi terciptanya pembelajaran yang efektif dan tercapainya tujuan dari kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

3.2 Optimalisasi Peran Pengawas di Sekolah Binaan

Peran pengawas sekolah untuk menyelesaikan hambatan yang dialami sekolah dalam pengimplementasian kurikulum merdeka menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Tentunya ini membutuhkan pengoptimalan peran pengawas dalam melatih dan membina satuan pendidikan. Rivaie menjelaskan, dengan mengoptimalkan peran pengawas satuan pendidikan akan memberikan dampak terhadap mutu pendidikan, terutama pada mutu pembelajaran (Rivaie, 2018).

Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam mengawasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, serta berusaha untuk berbagi pengetahuan yang luas kepada guru-guru yang dia bimbing, sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban. Di samping itu sebagai pembimbing para guru, pengawas sekolah diharapkan mampu merancang program pengawasan sekolah, mengevaluasi pencapaian belajar dan kemampuan guru, serta memiliki kemampuan dalam membina para guru. Pengawas juga bertugas mengelola data sumber daya pendidikan, mengawasi proses kegiatan belajar mengajar (KBM), memberikan bimbingan, serta mampu menilai hasil pengawasan di seluruh sekolah yang berada di bawah pengawasannya. Disisi lain, pengawas sekolah juga dituntut untuk melaksanakan berbagai bentuk pembinaan di sekolah selain pembinaan proses belajar mengajar (Rahmah, 2018).

Dilihat dari perannya sebagai fasilitator, trainer, coach, dan mentor di satuan pendidikan maka pengawas sekolah tentunya menjadi kunci utama bagi sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh sekolah. Dengan menjadi seorang coach pengawas harus bisa menempatkan dirinya sebagai rekan kerja. Tindakan ini memiliki potensi untuk membangkitkan motivasi di kalangan guru serta merangsang terciptanya ikatan keakraban dan kenyamanan. Hal ini dapat menjadikan guru untuk lebih terbuka dalam mengeluarkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Pengawas dapat membagikan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh guru dan kemudian mengembangkan hasil dari pertanyaan tersebut sehingga melahirkan ide-ide yang bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran (Hayati et al., 2021).

Dengan adanya peran dan keterampilan yang dimiliki oleh pengawas bina maka sudah seharusnya pengawas sekolah dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang menghambat guru dalam menjalani profesinya, juga memastikan pembelajaran berjalan efektif sehingga memberikan hasil yang berkualitas bagi peserta didik (Aisyah et al., 2023). Olehnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang maksimal dari implementasi kurikulum merdeka di sekolah, optimalisasi peran pengawas bina benar-benar dibutuhkan oleh pihak sekolah. Melalui pengaliran peran pengawas bina yang optimal di sekolah binaan tentu akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Semakin optimal pengawas dalam menjalankan perannya seperti supervisi dan juga pembinaan di sekolah maka akan memudahkan bagi sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam IKM. Tidak hanya itu, optimalisasi peran pengawas juga dapat meningkatkan kedekatan pihak sekolah dengan pengawas. Sekolah dan pengawas akan lebih saling terbuka dalam menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga ini akan membuka jalan bagi pengawas dan sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi selama IKM.

Berdasarkan hal itu, ada banyak konsep yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan peran pengawas untuk mengatasi hambatan sekolah terhadap implementasi kurikulum merdeka. sebagaimana yang dikemukakan oleh Hayati bahwa untuk mengoptimalkan peran pengawas ada 7 point yang perlu untuk dilakukan pengawas agar sekolah bisa mencapai hasil yang efektif dari kegiatan belajar mengajar. Sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Hayati et all. Konsep ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran pengawas di sekolah, adapun konsep tersebut yaitu:

1. Pengawas dan pihak sekolah memiliki pandangan bersama tentang pentingnya saling memahami prinsip, konsep, dan praktik yang efektif dalam pelaksanaan IKM.
2. Pengawas melakukan kunjungan ke sekolah tanpa mengganggu jalannya proses belajar dan secara langsung mengamati implementasi kurikulum merdeka di sekolah.
3. Pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan kunci yang terdeteksi selama kunjungan ke sekolah, yang nantinya akan menjadi topik diskusi dengan sekolah binaan.
4. Pengawas memberikan umpan balik mengenai implementasi kurikulum merdeka yang efektif. Namun, pengawas tidak seharusnya menganggap dirinya sebagai yang paling tahu atau paling cerdas. Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar bersama di mana pengetahuan dan keterampilan semua pihak dihargai.
5. Pengawas perlu memastikan bahwa setelah diskusi dan umpan balik, pihak sekolah memahami poin-poin penting yang perlu diterapkan di sekolah untuk meningkatkan kualitas dari implementasi kurikulum merdeka.

6. Dalam pertemuan berikutnya, pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah telah mengikuti arahan perbaikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran berdasarkan konsep dari kurikulum merdeka.
7. Hasil dari kunjungan dan kolaborasi antara pengawas dan sekolah harus mencakup pemantauan hasil dari pembelajaran, sehingga dapat dievaluasi apakah usaha bersama ini telah berhasil meningkatkan implementasi kurikulum merdeka.

Hayati et all. (2021), menambahkan bahwa paradigma humanistik memegang peranan yang sangat penting dalam pekerjaan seorang pengawas. Oleh karena itu, seorang pengawas perlu memiliki kecakapan dalam bidang psikologi dan sosiologi. Tanpa keterampilan berkomunikasi yang baik, peran seorang pengawas dapat memperburuk situasi, seperti meningkatnya tekanan pada pihak sekolah, dampak negatif pada kualitas pengajaran di kelas, dan kurangnya inovasi. Seorang pengawas harus mengadopsi paradigma baru yang melihat posisinya bukan sebagai yang paling benar, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengajak sekolah untuk bersama-sama belajar bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan melalui proses implementasi kurikulum merdeka di sekolah.

Kurikulum merdeka tidak hanya membawa konsep baru bagi sekolah dalam implementasinya tetapi juga bagi pengawas sekolah. Dimana konteks pengawas sekolah juga mengalami transformasi. Dalam paradigma yang lebih lama, peran seorang pengawas lebih terfokus pada tugas pengawasan dan pemeriksaan administratif, seperti memeriksa Rencana Pembelajaran (RP), daftar nilai, dan administrasi Kepala Sekolah atau kelas lainnya. Namun, dalam paradigma yang lebih baru, terjadi pergeseran fungsi yang signifikan. Tugas seorang pengawas tidak lagi terbatas hanya pada aspek administratif, tetapi lebih menitikberatkan pada usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru, sehingga peran pengawas sekolah telah berkembang menjadi mendukung perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Namun, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, sasaran dari kepengawasan masih belum dapat dicapai secara optimal (Tiraswati & Pendidikan, n.d.)

Hevria (2022) dalam webinar peran pengawas dalam implementasi kurikulum merdeka, menyebutkan 4 hal harus dilakukan pengawas untuk mengoptimalkan peran pengawas paradigma baru atau yang disebut sebagai pengawas pemberdaya dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah binaan, yaitu:

- a. Melaksanakan percakapan berbasis coaching dengan pihak sekolah baik kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua (pemangku kepentingan). Percakapan ini mencakup: 1) *Percakapan untuk perencanaan*, 2) *Percakapan untuk refleksi*, 3) *percakapan untuk pemecahan masalah*, dan 4) *Percakapan untuk kalibrasi*.
- b. Pertemuan rutin kepala sekolah dan guru.
- c. Pembinaan dan pendampingan lokakarya, KKG, KKS.

Tidak bisa lagi dipungkiri bahwa optimalisasi peran pengawas menjadi kunci dari hambatan yang dialami sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Olehnya perlu bagi pengawas untuk kembali melihat sudah sampai dimana atau sudah seberapa optimal pengawas dalam melakukan pengawasan di sekolah binaan. Optimalnya peran pengawas bukan hanya kepentingan bagi sekolah tetapi juga ini adalah tanggung jawab dan menjadi kewajiban bagi pengawas sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kedepannya tidak ada kesenjangan antara sekolah dan pengawas yang mengakibatkan turunnya kualitas pendidikan Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengawasan dalam konteks pendidikan, terutama oleh pengawas sekolah, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pengawas sekolah memiliki peran ganda sebagai mitra bagi guru dan kepala sekolah, serta berperan sebagai inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator, dan konsultan. Dalam Implementasinya di sekolah, kurikulum Merdeka menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pengetahuan guru, kurangnya pengalaman dalam merdeka belajar, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya motivasi guru. Pengawas sekolah dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peran mereka sebagai pembimbing, pelatih, dan mentor bagi guru-guru di sekolah. Pengawas sekolah juga perlu berperan dalam memastikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, termasuk penyediaan sarana prasarana yang memadai dan dukungan anggaran yang tepat. Sebab itu, melalui peran pengawas bina pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan seluruh tenaga pendidik di berbagai aspek yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, mulai dari administrasi pembelajaran, pengetahuan konsep pembelajaran kurikulum merdeka dan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep dari kurikulum merdeka. Dengan terpenuhinya beberapa

aspek ini akan dipastikan dapat memerikan kemudahan kepada pihak sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Optimalisasi peran pengawas sekolah dapat dicapai melalui berbagai langkah, termasuk pengembangan paradigma humanistik, komunikasi yang efektif, dan berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan. Selain itu, kerjasama antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal dari implementasi kurikulum Merdeka juga menjadi bagian penting demi optimalnya peran pengawas disekolah. Bagaimanapun optimalisasi peran pengawas sekolah bukan hanya kepentingan sekolah tetapi juga tanggung jawab pengawas dalam memastikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengoptimalkan peran pengawas sekolah, diharapkan hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka dapat diatasi, dan kualitas pendidikan di sekolah dapat terus meningkat.

REFERENSI

- Aisyah, S., Yusrianti, S., & Siregar, F. A. (2023). Peran Pengawas terhadap Profesionalisme Guru melalui in House Training (IHT) pada TK Islam Terpadu Ananda. *AS-SABIQUN*, 5(4), 973–992.
- Arifa, F. N. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dan tantangannya. *Bidang Kesejahteraan Rakyat: Info Singkat*, 14(9), 25–30.
- Hayati, H., Syaiful, M., & Khalifaturrahmah, K. (2021). Optimalisasi Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Hijri*, 10(2), 73–83.
- Hevria, S. (2022). Peran Pengawas Sekolah Pada Implementasi Kurikulum Merdeka. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=rERwLKvqWF0&t=1500s>
- Izzudin, A. T., & Susilowardani, S. (2012). Optimalisasi Supervisi Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 2(2), 95–108.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kurikulum Merdeka dengan Berbagai Keunggulan. Retrieved from <https://pskp.kemdikbud.go.id/berita/detail/313037/kurikulum-merdeka-dengan-berbagai-keunggulan>
- Lestiyani, P. (2020). Analisis persepsi civitas akademika terhadap konsep merdeka belajar menyongsong era industri 5.0. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(3), 365–372.
- Rahmah, S. (2018). Pengawas sekolah penentu kualitas pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2).
- Rivaie, W. (2018). Optimalisasi peran pengawas sekolah dan esensi lembaga penjaminan mutu pendidikan. *Jurnal Pembelajaran Prospektif*, 3(2).
- Tiraswati, D. M., & Pendidikan, W. (n.d.). *PERAN PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI PEMBERDAYA*.